



Article Informations
Corresponding Email:
miratania67@gmail.com

Received: 12/02/2025; Accepted:
22/02/2025; Published: 30/06/2025

FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PROGRAM KERJA SAMA G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT) BANGLADESH – MALAYSIA MENGENAI PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN ASAL BANGLADESH TAHUN 2021

Mira Tania

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Malaysia salah satu negara di Asia Tenggara dengan pekerja migran terbesar, salah satunya berasal dari Bangladesh. Hal tersebut membuat kedua negara bergerak untuk mengatasi mobilitas pekerja migran agar terkontrol dengan cara melakukan kerja sama G2G (*Government to Government*). Walaupun MoU kerja sama telah diratifikasi implementasi dari kerja sama belum terlihat hasilnya.

Diketahui ada beberapa faktor yang menghambat implementasi kerja sama, salah satunya keterlibatan Bestinet Sdn Bhd yang berperan penting dalam sektor perekrutan pekerja migran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor apa saja yang menghambat program kerja sama G2G Bangladesh dan Malaysia pada Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama G2G antara pemerintah Bangladesh dan Malaysia terhambat oleh beberapa faktor di antaranya tidak selaras antara pemerintah dan LSM, korupsi, serta kegagalan pemerintah.

Kata Kunci: Kerja Sama, Bangladesh, Malaysia, Pekerja Migran, G2G.

Abstract

Malaysia is one of the biggest countries in Southeast Asia with migrant workers, one of whom is from Bangladesh. This issue made both countries move to take care of migrant worker mobility to be more controlled by doing G2G cooperation. Even though the cooperation's MoU has been ratified, the implementation from the cooperation has not shown progress.

It is known that there are some factors that inhibit the implementation of the cooperation, one of which is the involvement of Bestinet Sdn Bhd, which has a main role in the recruitment sector for migrant workers. The purpose of this research is to analyze factors that inhibit G2G Bangladesh and Malaysia's cooperation program in 2021. This research used a qualitative method with a descriptive analytical type, and data has been collected through literature study and interview.

The result from this research showed that the G2G cooperation between Bangladesh and Malaysia inhibited by many factors; some of them are the governments are not in harmony with NGO (non-Governmental Organization), Corruption, also the goverment's failure.

Keywords: Cooperation, Bangladesh, Malaysia, Migrant Worker, G2G

PENDAHULUAN

Dalam praktiknya berbagai fenomena hubungan internasional juga sangat mempengaruhi *decision maker* terhadap kepentingan negaranya. Fenomena tersebut yaitu isu – isu non tradisional, salah satunya migrasi internasional yang dalam hal ini mengenai pekerja migran yang bermigrasi ke Malaysia. Oleh karena itu, dengan adanya migrasi dan mobilitas manusia yang sulit dikontrol khususnya di perbatasan maka dilakukan upaya kerja sama. Terkait dengan migrasi internasional, secara umum migrasi internasional dapat membantu meningkatkan kehidupan masyarakat baik di negara asal maupun di negara tujuan.¹

Tetapi, banyaknya kasus eksploitasi dan perdagangan manusia yang dilakukan oleh agen penyalur atau perantara lainnya sulit untuk ditangani. Dikarenakan tindakan eksploitasi sering terjadi dalam proses penerimaan dan penyaluran pekerja migran.² Begitu pun Malaysia sebagai salah satu negara terbesar yang menjadi tujuan pekerja migran, sesuai laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat : Laporan Tindakan Perdagangan Orang 2022 Malaysia, Pemerintah Malaysia yang tidak memenuhi standar minimum mengenai pemberantasan tindakan perdagangan orang dan kurang dalam melakukan upaya yang signifikan sehingga Malaysia tetap di tingkat 3 dalam permasalahan tersebut.³ Sedangkan Laporan Tindakan Perdagangan Orang 2022 Bangladesh masih di tingkat 2 yang mana Pemerintah Bangladesh telah melakukan upaya untuk menangani tindakan perdagangan orang dan upaya yang meningkat daripada laporan sebelumnya, meskipun

¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990), hal. 27-28.

² Norliza Dolhan et all, 2021, "Human Trafficking and Human Security in Southeast Asia : A Case Study of Bangladesh Foreign Workers in Malaysia", *Journal of Nusantara Studies*, Vol. 6, hal 139.

³ US Department of State, *2022 Trafficking in Persons Report : Malaysia*, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/malaysia/> diakses pada 11 Desember 2022.

tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.⁴

Dari laporan tersebut, kedua negara masih kurang dalam melakukan usaha yang signifikan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan perdagangan orang terhadap pekerja migran asal Bangladesh. Karena adanya berbagai hambatan seperti banyaknya pekerja migran yang masuk ke Malaysia secara ilegal tanpa dokumen resmi dan sulitnya untuk mengontrol banyaknya jumlah pekerja migran yang masuk. Oleh karena itu, Pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Bangladesh membuat program G2G (*Government to Government*) mengenai perekrutan pekerja migran asal Bangladesh.⁵ Pada tahun 2007 Malaysia melarang masuk pekerja migran asal Bangladesh dikarenakan ratusan dari mereka yang tiba di Bandara Malaysia tidak kunjung dijemput oleh perantara yang akan mempekerjakan mereka. Langkah Pemerintah Malaysia menimbulkan protes dari Pemerintah Bangladesh yang berharap langkah tersebut hanya bersifat sementara.⁶

Setahun berikutnya yaitu pada tahun 2008, Pemerintah Malaysia masih memberlakukan pelarangan masuknya pekerja migran asal Bangladesh karena banyaknya kasus tindakan eksploitasi terhadap pekerja migran oleh agensi perekrut dan perantara yang memberangkatkan mereka menuju Malaysia. Selain itu, pada Tahun 1999 Pemerintah Malaysia memberlakukan langkah yang sama namun, mencabutnya dengan melakukan penerimaan kembali pekerja asal Bangladesh ke Malaysia.⁷ Mengenai program G2G Bangladesh – Malaysia, ada dua perjanjian yang berlangsung selama rentang tahun 2012 hingga 2018. Program G2G pertama berlangsung dari tahun 2012 hingga 2015 yang mengatur dan membahas penerimaan pekerja migran di bidang industri perkebunan, yang diikuti oleh program G2G *Plus* 2015 mengganti program sebelumnya dengan

⁴ US Department of State, *2022 Trafficking in Persons Report : Bangladesh*, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/> diakses pada 11 Desember 2022.

⁵ New Straits Times, *Malaysia Bangladesh Sign MoU on Worker Recruitment*, <https://www.nst.com.my/news/nation/2021/12/755990/malaysia-bangladesh-sign-mou-worker-recruitment> diakses pada 11 Desember 2022.

⁶ Reuters, *Malaysia Bans Bangladeshi Workers Dhaka Upset*, <https://www.reuters.com/article/idINIndia-29846720071004> diakses pada 7 Desember 2022.

⁷ Global Skill Partnerships, *Malaysia – Bangladesh G2G Program*, <https://gsp.cgdev.org/legalpathway/malaysia-bangladesh-g2g-program/> Diakses pada 7 desember 2022.

menambahkan tujuh industri di Malaysia yang akan ditambahkan pada MoU (*Memorandum of Understanding*) Migrasi.⁸

Percobaan pertama program G2G Bangladesh – Malaysia pada tahun 2013 dengan rencana melakukan penerimaan puluhan ribu pekerja namun, nyatanya yang melamar mencapai 1 juta lebih yang difasilitasi oleh *Bureau of Manpower, Employment, and Training* Bangladesh, sehingga badan pemerintah tersebut tidak dapat mengatur banyaknya pekerja migran yang mendaftar untuk bekerja ke Malaysia. Serta tidak dilibatkannya sektor swasta pada proses tersebut oleh karena itu, pemerintah yang terlibat gagal dalam mengelola penerimaan pekerja migran asal Bangladesh yang mendaftar dalam jumlah banyak.

Kesepakatan selanjutnya pada Tahun 2015, kedua negara kembali menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan nama G2G *Plus*. G2G *Plus* ini merupakan kesepakatan yang memberlakukan sektor swasta untuk melakukan rekrutmen dengan pemerintah sebagai pengawas regulasinya, kelebihanannya dalam G2G *Plus* ini mampu menangani seratus ribu lebih pekerja. Namun, mekanisme dalam kesepakatan G2G *Plus* ini mendapatkan kritik dikarenakan beberapa dari 10 agensi perekrut di Bangladesh melakukan interaksi perekrutan pekerja dengan Malaysia. Hal ini pun berdampak pada munculnya rasa khawatir akan adanya biaya perekrutan yang tinggi dan malpraktik.

Selain itu, Asosiasi Agen Perekrutan Internasional Bangladesh (BAIRA) menentang mekanisme G2G *Plus* ini karena hanya 10 agensi perekrut internasional yang dapat beroperasi dalam mekanisme tersebut. Adapun, kesepakatan G2G *Plus* ini dinilai kurang transparan dan adanya peningkatan biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pekerja migran. Akibatnya dari adanya kontroversi dari kesepakatan G2G *Plus* tersebut, pada September 2018 Pemerintah Malaysia melarang perekrutan pekerja dari Bangladesh dan menghentikan kesepakatan G2G *Plus*. Penangguhan pekerja asal Bangladesh pada September 2018 oleh pemerintah Malaysia tersebut dikarenakan adanya tuduhan malpraktik dalam proses perekrutan dan biaya perekrutan

⁸ Mutasim Billah Mubde et al, *The Hidden Costs of Migration : Evaluating the Bangladesh – Malaysia Corridor*, (Arkansas : Winrock International, 2022) hal 5.

yang tinggi, setelah itu Kementerian Ekspatriat Bangladesh terus melakukan negosiasi dengan otoritas Malaysia untuk membuka kembali perekrutan untuk pekerja migran Bangladesh.⁹

Setelah 3 tahun melarang merekrut pekerja asal Bangladesh menuju Malaysia, akhirnya pada 19 Desember 2021 Pemerintah Bangladesh dan Malaysia menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) mengenai rekrutmen pekerja Bangladesh yang berlaku selama 5 tahun hingga Desember 2026. MoU tersebut ditandatangani oleh Datuk Seri M. Saravanan sebagai Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia dan Imran Ahmed sebagai Menteri Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh.¹⁰ MoU itu berisikan tanggung jawab dari kedua negara, termasuk tanggung jawab majikan Malaysia dan pekerja dari Bangladesh serta tugas agen tenaga kerja dari kedua negara. Pelaksanaan MoU tersebut juga akan diatur dalam *Joint Working Group* yang beranggotakan Malaysia dan Bangladesh. Kesepakatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja asing termasuk di sektor perkebunan dalam keadaan mendesak.

PEMBAHASAN

Dari permasalahan tersebut, pemerintah dengan lembaga non pemerintah tidak dapat melakukan kerja sama dengan baik yang terarah dalam mengatur mobilisasi pekerja migran, administrasi, hingga penempatan pekerja diberbagai sektor. Sangat jelas, masalah seperti yang telah diuraikan dapat mengakibatkan ketimpangan, yang mana berfokus pada aspek pengembangan ekonomi dibandingkan aspek sosial seperti mensejahterakan pekerja migran.

⁹ The Business Standard, Bangladesh Malaysia May Sign MoU 19 Dec to Recruit Workers, <https://www.google.com/amp/s/www.tbsnews.net/bangladesh/migration/bangladesh-malaysia-may-sign-mou-19-dec-recruit-workers-343234%3famp> diakses pada 1 Maret 2023.

¹⁰ The Star, Malaysia Bangladesh Sign MoU on Recruitment of Workers, <https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/12/19/malaysia-bangladesh-sign-mou-on-recruitment-of-workers> diakses pada 13 Desember 2022.

1. Dari hasil wawancara dengan Adrian Pereira selaku Direktur Eksekutif dari *North South Initiative* (NGO) Malaysia, beliau menjelaskan tidak adanya progres dalam program kerja sama Malaysia – Bangladesh mengenai rekrutmen pekerja migran asal Bangladesh yaitu tidak selarasnya antara pemerintah dengan lembaga non-pemerintah (LSM) dalam memprioritaskan pekerja migran.¹¹

- Prioritas dan tujuan : Pemerintah pada dasarnya memprioritaskan yang berfokus pada aspek ekonomi dan diplomasi untuk merekrut pekerja migran yang bertujuan untuk meningkatkan remitansi, menurunkan angka pengangguran lokal, serta memperkuat hubungan bilateral. Sedangkan LSM berfokus pada hal-hal yang mengenai perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan pekerja migran, dan berusaha mengurangi risiko eksploitasi dan berbagai penyalahgunaannya.

2. Korupsi dan kegagalan pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia terhadap pekerja migran

Terdapat laporan dari *Public Account Committee* (PAC) bahwa sistem perekrutan pekerja migran di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang telah berlangsung selama enam tahun namun, kontraknya tidak diresmikan.¹² Dilaporkan juga surat penerimaan FWCMS terbit sejak tahun 2018 namun, hingga saat ini kontrak

¹¹ Wawancara secara *daring* dengan Adrian Pereira *Executive Director of North South Initiative* Malaysia pada 2 Oktober 2023.

¹² The Center to Combat Corruption and Cronyism (C4), 2024, “PAC findings expose massive misgovernance issue at the heart of migrant labour recruitment, police investigations must ensue” di <https://c4center.org/pac-findings-expose-massive-misgovernance-issue-at-the-heart-of-migrant-labour-recruitment-police-investigations-must-ensue/> pada 12 September 2024.

tersebut belum ditandatangani oleh pemerintah dan penyedia layanan yaitu Bestinet Sdn Bhd yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri sampai Maret 2024 belum diresmikan yang dianggap telah melanggar standar pemerintah. Diketahui juga sebanyak 24 agen penyalur tidak sah disetujui oleh petugas Kementerian Sumber Daya Manusia untuk mendatangkan pekerja asing.

Bestinet Sdn Bhd merupakan perusahaan kontroversial yang pernah didatangi oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) pada tahun 2022 lalu dikarenakan adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan melibatkan 25 agen perekrut pekerja migran di Bangladesh. Investigasi independen juga mengungkap bahwa Bestinet Sdn Bhd terikat dengan politisi dan individu berpengaruh melalui komposisi anggota dewan direksi.¹³

Di tahun 2023 Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) kembali membekuk beberapa pejabatnya di Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia dituduh terlibat dalam korupsi terkait rekrutmen pekerja migran asal Bangladesh. Tidak hanya itu saja, MACC juga menggeruduk Bestinet dan menginterogasi salah satu pemegang saham utamanya yaitu Mohamed Amin. Mohamed Amin Abdul Nor merupakan warga negara asal Bangladesh yang sekarang berkewarganegaraan Malaysia dan dekat dengan para pejabat tinggi negara ataupun politisi Malaysia.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ CNA.id, 2024, “Rencana Malaysia Merombak Sistem Rekrutmen Pekerja Migran Yang Bermasalah Menuai Penentangan”, di <https://www.cna.id/asia/rencana-malaysia-merombak-sistem-rekrutmen-pekerja-migran-yang-bermasalah-menuai-penentangan-16866> pada 12 September 2024.

Bestinet merupakan pemain penting dalam sektor perekrutan pekerja migran. Bestinet mendapatkan keuntungan hingga miliaran ringgit dari proses rekrutmen pekerja asing di Malaysia. Data dari Komisi Perusahaan Malaysia, Bestinet mengumumkan laba bersih sebesar RM 85,04 miliar (sekitar Rp 300 miliar) meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Perusahaan swasta ini yang paling terdepan menolak adanya perombakan kebijakan perekrutan tenaga kerja asing yang diusung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kementerian dalam negeri Malaysia berencana untuk mengganti sistem teknologi informasi yang mengelola pergerakan pekerja asing masuk ke Malaysia, dalam temuannya sistem yang digunakan perusahaan swasta itu kerap disalahgunakan.

Bestinet rupanya mengelola *Foreign Workers Centralised Management System (FWCMS)* atau Sistem Manajemen Pekerja Asing Terpusat, satu satunya *platform* yang digunakan Departemen Imigrasi untuk mengajukan visa bagi 15 negara pengirim pekerja migran ke Malaysia, kontrak FWCMS ini telah berakhir pada Mei lalu, FWCMS ini juga salah dalam pengelolaannya yang menyebabkan terjadinya eksploitasi pekerja migran baik di negara penerima ataupun di negara pengirim.¹⁵

Setahun terakhir ini, Pemerintah Malaysia telah berusaha mengembangkan sistem teknologi informasi baru agar proses rekrutmen lebih murah, transparan, dan mengurangi campur tangan dari pihak

¹⁵ *Ibid.*

ketiga seperti calo. Anwar Ibrahim pun telah mengalihkan pengendalian dan pengadaan pekerja migran dari Kementerian Sumber Daya Manusia menjadi di bawah pengawasan langsung Kementerian Dalam Negeri.¹⁶

Adapun, perekrutan pekerja migran di Malaysia telah lama menjadi perbincangan baik di dalam maupun di luar negeri karena kasus eksploitasi yang melibatkan politisi semakin sulit untuk dihentikan. Hal ini tentu menjadikan Malaysia masuk dalam daftar negara dengan pengelolaan pekerja migran yang buruk apalagi dalam menuntaskan masalah perdagangan manusia sama halnya dengan Cina dan Korea Utara.

Dalam laporan 2024 *Trafficking in Persons Report* Malaysia, pemerintah Malaysia yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria atau standar dalam memberantas perdagangan manusia namun, telah ada upaya untuk mengatasinya. Karena itu, Malaysia naik ke tingkat dua sedangkan tahun sebelumnya yang berada di tingkat tiga.¹⁷ Tetapi, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada, Malaysia dinilai masih gagal dalam mengatasi perekrutan pekerja migran dan dominasi Bestinet sebagai perusahaan swasta daripada Pemerintah Malaysia. Tidak hanya di Malaysia, di Bangladesh pun terjadi hal yang sama dikarenakan terlalu banyak lapisan agen pengirim atau calo pekerja migran.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ U.S. Embassy In Malaysia : "2024 *Trafficking in Persons Report* Malaysia" di [https://my.usembassy.gov/2024-trafficking-in-persons-report-malaysia/#:~:text=MALAYSIA%20\(Tier%202\)&text=The%20Government%20of%20Malaysia%20does,was%20upgraded%20to%20Tier%202](https://my.usembassy.gov/2024-trafficking-in-persons-report-malaysia/#:~:text=MALAYSIA%20(Tier%202)&text=The%20Government%20of%20Malaysia%20does,was%20upgraded%20to%20Tier%202) pada 24 September 2024.

¹⁸ *Op. Cit.*

3. Kesulitan dalam mengimplementasikan program G2G dalam merekrut pekerja migran asal Bangladesh

Dari perspektif kelembagaan, kapasitas suatu negara untuk memberantas kerja paksa bergantung pada undang – undang dan kebijakan yang telah berlaku dan yang lebih penting terletak pada tata kelola dan implementasinya.¹⁹Kesulitan untuk mengimplementasikan program *government to government* Bangladesh – Malaysia yang pertama, Malaysia telah terlanjur memberikan kebebasan pada industri tenaga kerja dan jasa yang berkaitan terus mengakar, dan memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan besar dari proses pengiriman tenaga kerja sehingga menyebabkan calon pekerja harus membayar biaya dan utang sangat tinggi, hal tersebut rentan terjadinya kerja paksa.²⁰

Outsourcing atau pengalihdayaan (tugas, layanan, dan fungsi dialihkan kepada pihak ketiga) tenaga kerja berkembang pesat menjadi industri yang lebih dari hanya sekedar memfasilitasi perekrutan tenaga kerja, tetapi mempekerjakan tenaga kerja dengan tidak mengacu pada hukum yang berlaku (*de facto*) yang dapat melemahkan kewajiban dan tanggungjawab sebuah institusi dalam mengelola sumber daya khususnya sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan serta mengubah tenaga kerja menjadi objek dagang yang memiliki nilai ekonomi. Hal seperti itu, dapat menghilangkan tanggungjawab antara pemberi kerja dan pekerja, juga telah banyak diidentifikasi sebagai

¹⁹ Op.Cit. Hal – 8.

²⁰ *Ibid*, hal-15.

sumber utama pelanggaran ketenagakerjaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.²¹

Banyaknya perusahaan *outsourcing* di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri Malaysia mencerminkan pelanggaran dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dalam proses perekrutan tenaga kerja namun, pada tahun 2019 praktik seperti itu telah dihentikan. Adanya perubahan tersebut, dapat memberikan kejelasan pada pekerja dan pemberi kerja soal hubungan kerja seperti kontrak kerja dan keuntungan yang dapat diberikan pemberi kerja kepada pekerja migran.

Kedua, Inkonsistensi kebijakan dan tidak transparan diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum yang melemahkan efektivitas pemerintah dalam mengatur arus migran dan standar ketenagakerjaan. Undang-undang dan peraturan telah diusulkan untuk dapat melindungi pekerja migran tetapi, berbagai lembaga hukum masih terkotak-kotak dan kurang berbaur. Contohnya pada tahun 2007, dibentuk satuan tugas di bawah lingkup MAPO, Dewan Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran belum memiliki terobosan atau kolaborasi antar lembaga terutama dalam lambatnya dakwaan terhadap pelaku perdagangan manusia.

Ketiga, yurisdiksi pemerintah yang tumpang tindih, salah satunya termasuk kesalahan penempatan peran kementerian yang melemahkan manajemen tenaga kerja. Tanggung jawab, wewenang, dan dasar

²¹ *Ibid.*

pengetahuan dalam masalah ketenagakerjaan dipegang oleh Kementerian Sumber Daya Manusia (MoHR) tetapi, pengambilan keputusan mengenai persetujuan pekerja migran secara terpisah dilakukan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.²²

Kementerian Sumber Daya Manusia (MoHR) mengawasi permohonan kuota pekerja migran yang diajukan oleh pemberi kerja namun, Kementerian Dalam Negeri memegang kekuasaan untuk menyetujui alokasi akhir dan pemilihan negara asal. Hal tersebut, dikaitkan dengan kecenderungan untuk menanggapi masalah pekerja migran sebagai masalah keamanan. Rekam jejak Kementerian Dalam Negeri dalam memimpin sektor *outsourcing* tenaga kerja dan privatisasi imigrasi memicu industri pasokan tenaga kerja yang berorientasi pada keuntungan dan beberapa pelanggaran termasuk pemalsuan identitas adanya “persetujuan khusus” atas kartu pekerja migran yang melebihi jumlah, diproses melalui jalur reguler yang dinilai salah kelola di bawah Kementerian Dalam Negeri.²³

Peralihan wewenang dalam pengambilan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Sumber Daya Manusia telah diproses secara sistematis bertahun – tahun lamanya dan mendapatkan perhatian, khususnya dikarenakan *Foreign Workers Centralized Management System* (FWCMS) pada awalnya berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dinyatakan berpindah menjadi di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia. Hal ini terus menjadi

²² *Ibid* hal-18.

²³ Hishamudin Yunus Chairman of PAC 2020 dalam Lee Hwok Aun & Adrian Pereira, 2023, *paper* : “*Can Malaysia Eliminate Forced Labour By 2030?*” hal- 19.

masalah yang tidak tentu arahnya terlebih tidak dapat mengambil keputusan, misalnya keputusan pemerintah persatuan pimpinan pakatan harapan yang membingungkan untuk mengalihkan urusan pengawasan dari Kementerian Sumber Daya Manusia ke Kementerian Dalam Negeri.

Keempat, tindakan korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi hal yang sering terjadi di Malaysia dengan ukuran penyebaran yang tidak dapat tertolong terhadap pekerja migran karena luasnya cakupan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat, penyelundup, dan sindikat TPPO serta lambatnya proses penuntutan terhadap pelaku. Catatan buruk penuntutan di Malaysia dan jatuhnya harga diri negara di depan hukum terhadap kasus – kasus pekerja migran menjadi salah satu faktor utama rendahnya peringkat negara Malaysia dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Analisis berdasarkan Pendekatan Liberalisme Interdependensi, interdependensi merujuk pada ketergantungan dari adanya hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah yang dipengaruhi oleh tindakan dari negara lain. Di masa sekarang negara membutuhkan kekuatan dari tenaga kerja yang berkualitas, akses informasi, dan modal keuangan yang menjadi kunci negara dapat berkembang pesat. Dalam penelitian ini, faktor-faktor penghambat program kerja sama G2G Bangladesh dan Malaysia mengenai perekrutan pekerja migran asal Bangladesh berdasarkan asumsi dari kaum liberal berpendapat bahwa pembagian tenaga kerja yang tinggi

dalam perekonomian internasional dapat meningkatkan interdependensi antarnegara sehingga dapat mengurangi konflik.²⁴

Bangladesh dan Malaysia keduanya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dalam bidang perekonomian yaitu melalui rekrutmen pekerja migran asal Bangladesh, pemerintah Malaysia membutuhkan tenaga kerja migran khususnya berasal dari Bangladesh untuk di sektor-sektor tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai perkembangan dalam negeri Malaysia dalam hal ini pembangunan perekonomiannya. Begitu pun, pemerintah Bangladesh sangat berharap dan bergantung pada pemerintah Malaysia untuk membuka perekrutan pekerja asal Bangladesh sebagai salah satu cara menekan perekonomian mereka yang menurun melalui devisa dari para pekerja migran. Dari adanya ketergantungan tersebut, kedua negara telah melakukan beberapa kali kerja sama G2G (*Government to Government*) yang hingga saat ini masih berjalan dan telah diratifikasi pada 19 Desember 2021.

Walaupun, berdasarkan asumsi dasar dari pendekatan liberalisme interdependensi Adam Smith, saling ketergantungan ekonomi antarnegara dapat mengurangi risiko terjadinya perang dengan melakukan perdagangan dan usaha dalam mengejar keuntungan akan menciptakan harmoni sosial.²⁵ Dalam kasus kerja sama G2G Bangladesh dan Malaysia, mengejar keuntungan dalam bidang ekonomi melalui perekrutan pekerja migran dan usaha dalam mendapatkan keuntungan yang telah dilakukan oleh kedua negara tidak akan jauh dari campur tangan pihak-pihak yang tidak

²⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2013, "*Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal-185.

²⁵ Mohamad Rosyidin, 2020, "*Teori Hubungan Internasional : Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*", Kota Depok : PT Rajagrafindo Persada , Hal-53.

bertanggungjawab lalu memanfaatkan situasi diperbatasan kedua negara yang menjadi tempat mobilitas manusia sulit untuk dikendalikan dan menjadi tempat berlangsungnya penyelundupan hingga tindakan kriminal TPPO terhadap pekerja migran asal Bangladesh.

Hal ini harus menjadi fokus bagi pemerintah Malaysia dan Bangladesh, sebagaimana yang tertulis dalam buku ke-4 Adam Smith "*The Wealth of Nations*" menyebutkan tiga pokok tugas pemerintah yaitu melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain, melindungi masyarakat dari penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan masyarakat lain dengan menciptakan pemerintahan yang adil, dan memastikan individu-individu dapat mengejar kepentingannya dengan menciptakan sistem kelembagaan yang kondusif.²⁶

Berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di lapangan, implementasi kerja sama G2G Bangladesh dan Malaysia terhambat setelah ratifikasi MoU pada 19 Desember 2021, hal seperti itu sebelumnya telah terjadi pada tahun 2018 yang berakhirnya kerja sama G2G yang telah dibentuk sejak tahun 2016. Berdasarkan teori kerja sama internasional, kerja sama antar negara memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, salah satu faktor yang menghambat kerja sama G2G Bangladesh dan Malaysia adalah kebijakan Pemerintah Malaysia tidak mempertimbangkan saran, baik dari pekerja migran ataupun dari pihak Pemerintah Bangladesh yang meminta transparan dalam proses rekrutmen pekerja migran dalam masalah upah, biaya keberangkatan, dan keadilan hukum.²⁷

²⁶ *Ibid*, Hal-47.

²⁷ Yanuar Ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2014) hal 273.

Menurut K.J. Holsti, dalam kerja sama kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antaraktor yang bekerja sama akan berujung pada konflik dan apabila keduanya mencapai kesepakatan akan menghasilkan suatu kerja sama.²⁸ Pemerintah Bangladesh dan Malaysia sulit dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai bagaimana agar perekrutan pekerja migran asal Bangladesh dapat dilaksanakan tanpa terlalu membebankan biaya rekrutmen yang tinggi kepada calon pekerja dan dapat disalurkan ke sektor yang tersedia di Malaysia. Malaysia telah terlanjur memberikan kebebasan pada industri tenaga kerja dan jasa yang berkaitan terus mengakar, dan memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan besar dari proses perekrutan tenaga kerja sehingga menyebabkan calon pekerja harus membayar biaya dan memiliki utang sangat tinggi.

Peneliti menggunakan konsep *Human Security* yang sangat berkaitan dengan pekerja migran. *Human security* salah satu isu-isu yang masih ada saat ini atau biasa disebut isu kontemporer, konsep ini mengenai keamanan manusia dan mencakup keamanan suatu negara terutama di lintas batas antarnegara. Konsep ini juga menjelaskan bahwa individu dapat dilindungi dari berbagai ancaman seperti ancaman yang merusak integritasnya sebagai manusia atau ancaman yang menimbulkan kehancuran fisik terhadap kepemilikan individu.²⁹

Konsep *human security* telah menjadi wacana kebijakan di beberapa negara, contohnya Jepang yang memberikan definisi bahwa *human security* mencakup semua aspek yang dapat membahayakan kelangsungan

²⁸ Era Riana, 2016, “Kerja sama Indonesia – Korea Selatan Dalam Mendukung Program One Village One Product (OVOP) Di Indonesia 2013-2015”, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Riau, Vol.3, No.1, hal 5.

²⁹ Op.cit, hal – 205.

hidup, kehidupan sehari-hari, dan martabat manusia.³⁰ Pekerja migran dianggap pekerja di bawah standar yang tidak memiliki keterampilan, tetapi pada hakikatnya pekerja migran pun berhak mendapatkan perlindungan dari adanya ancaman seperti dieksploitasi mulai dari masa keberangkatan hingga bekerja di bawah tekanan majikan atau yang lebih parah menjadi korban TPPO.

Pengalaman buruk yang sering terulang dan dirasakan oleh pekerja migran tidak pernah menjadi salah satu fokus utama pemerintah di negara tujuan atau di negara pengirim, hal ini disebabkan sulitnya jangkauan baik pemerintah atau LSM untuk memantau proses perekrutan hingga bekerja dibawah majikan secara langsung karena mayoritas pekerja migran bekerja di sektor domestik yang mana di bawah perintah majikan secara langsung. Namun, negara mungkin bukan kondisi yang memadai bagi keamanan individu dan kemungkinan menjadi masalah utama. Tetapi, hampir semuanya memerlukan kondisi keamanan bagi setiap individu. Sebab, tanpa negara tidak akan jelas lembaga apa yang akan bertindak atas nama individu.³¹

KESIMPULAN

Banyaknya pekerja migran yang masuk ke Malaysia secara ilegal tanpa dokumen resmi membuat Pemerintah Bangladesh dan Malaysia tergerak untuk membentuk program kerja sama G2G (*Government to Government*) pada tahun 2021 untuk merekrut pekerja migran khususnya

³⁰ Catia Gregoratti, Britannica.com : “*Human Security, Political Science*”, di akses di <https://www.britannica.com/topic/human-security> pada 19 Januari 2025.

³¹ Buzan in Tan See Seng, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore: “*Human Security : Discourse, Statecraft, Emancipation*”, Paper (Singapore, 2001), hal 15

yang berasal dari Bangladesh. Meskipun MoU telah diratifikasi pada 19 Desember 2021 namun, kerja sama G2G belum terlihat progresnya hingga saat ini.

Faktor – faktor yang menghambat program kerja sama G2G (*Government to Government*) di antaranya Pemerintah kedua negara dan LSM tidak selaras dalam memprioritaskan pekerja migran, korupsi dan kegagalan pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia terhadap pekerja migran, serta Pemerintah kesulitan dalam mengimplementasikan program G2G dalam merekrut pekerja migran asal Bangladesh.

Hal terpenting tidak adanya progres program kerja sama G2G ini yaitu Bestinet Sdn Bhd pemain penting dalam merekrut pekerja migran khususnya asal Bangladesh yang mendapatkan keuntungan hingga miliaran ringgit. Selain itu, Bestinet terikat dengan politisi dan individu berpengaruh di Malaysia, hal ini semakin mempersulit Pemerintah Bangladesh dan Malaysia untuk menumpas korupsi dan eksploitasi terhadap pekerja migran sebab banyaknya pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W.(2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Idrus, Muhammad.(2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta).
- Ikbar, Yanuar. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. (Bandung : Refika Aditama).
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen.(2013). *Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional* .(Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Mas'oed, Mohtar, (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia).
- Rosyidin, Mohamad.(2020).*Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. (Depok : PT Rajagrafindo Persada).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Penerbit Alfabeta).

- Ahmad, Rashad. *New Age : Malaysia to make major policy changes*. Diakses pada 7 Februari 2024 dari newagebd.net
- Annadurai, Isha Nanthini. (2022). *Malaysiakini : Letter, How migrant workers' life developed in Malaysia*. Diakses pada 27 Januari 2024 dari <https://www.malaysiakini.com/letters/644819>
- Bangladesh High Commission Malaysia. (2024). *Bangladesh – Malaysia Trade Relations* Diakses pada 12 Agustus 2023 dari <https://www.bdhckl.gov.bd/bangladesh-malaysia-trade-relations/>
- Bangladesh High Commission Malaysia. (2023). *Bangladesh – Malaysia Bilateral Relations : A Bright Star in The Horizon*. Diakses pada 27 Juli 2023 dari <https://www.bdhckl.gov.bd/bangladesh-malaysia-bilateral-relations/>
- Bernama.(2021).*News Straits Times : “Malaysia, Bangladesh Sign MoU on Worker Recruitment”*. Diakses pada 7 September 2023. Dari <https://www.nst.com.my/news/nation/2021/12/755990/malaysia-bangladesh-sign-mou-worker-recruitment>
- CNA.id. (2024). *Rencana Malaysia Merombak Sistem Rekrutmen Pekerja Migran Yang Bermasalah Menuai Penentangan*. Diakses pada 12 September 2024 dari <https://www.cna.id/asia/rencana-malaysia-merombak-sistem-rekrutmen-pekerja-migran-yang-bermasalah-menuai-penentangan-16866>
- Dhaka Tribune. 2022. *“Bangladesh, Malaysia Reaffirm Commitment to Further Strengthening Ties”* di akses di dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/290826/bangladesh-malaysia-reaffirm-commitment-to pada 25 Agustus 2023.
- Dhaka Tribune. (2021). *D-8 Summit on April ; focus on trade, investment, Rohingya crisis*. Diakses pada 18 Agustus 2023 dari <https://www.dhakatribune.com/amp/bangladesh/242651/d-8-summit-on-april-8-focus-on-trade-investment>
- D-8 Organization for Economic Cooperation. Diakses pada 23 Februari 2023 dari Developing8.org
- En.prothomalo.com. *Bangladesh, Malaysia want to conclude bilateral FTA*. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://www.google.com/amp/s/en.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/9t60ghkq41>
- Farhana, Khandaker Mursheda & Kazi Abdul Mannan. 2024. *Migration Policy Institute : Bangladesh's Economic Vitality Owing in Part to Migration and Remittances*. Diakses pada 19 Januari 2025 dari migrationpolicy.org
- Global Skill Partnerships. *Malaysia – Bangladesh G2G Program*. Diakses pada 7 Desember 2022 dari <https://gsp.cgdev.org/legalpathway/malaysia-bangladesh-g2g-program/>
- Gregoratti, Catia. *Britannica.com : Human Security, Political Science*. Diakses pada 19 Januari 2025 dari <https://www.britannica.com/topic/human-security>
- International Organization for Migration Malaysia. (2024). Diakses pada 12 Januari 2024 dari <https://www.iom.int/countries/malaysia>
- IOM UN Migration Bangladesh. (2021). *World grows with 281 million migrants ; Bangladesh is the 6th largest migrant sending country*. Diakses pada 17 Januari 2024 dari <https://bangladesh.iom.int/news/world->

grows-281-million-migrants-bangladesh-6th-largest-migrant-sending-country

IOM UN Migration. (2018). *Making Migration Work For All*. Diakses pada 11 Juni 2024 dari <https://www.iom.int/news/un-migration-agency-welcomes-un-secretary-generals-report-making-migration-work-all>

Islam, Nurul. Paper : *Migration From Bangladesh and Overseas Employment Policy*. Diakses pada 13 Februari 2024 dari bmet.portal.gov.bd

Kementerian Dalam Negeri Malaysia : “*Current Policies on Recruitment of Foreign Workers*”. Diakses pada 7 Februari 2024 dari <https://www.moha.gov.my/index.php/en/bahagian-pa-dasar-dasar-semasa/current-policies-on-recruitment-of-foreign-workers>

Mahmud, Jamil. 2022. *The Daily Star : Migration to Malaysia : No Progress after MoU*. diakses pada 5 Agustus 2023 dari <https://www.thedailystar.net/nrb.migration/news/migration-malaysia-no-progress-after-mou-3037201%3famp>

Meena, Yanitha. Institute of Strategic & International Studies (ISIS) Malaysia : “*Expanding Malaysia – Bangladesh Ties*” diakses di isis.org.my.

Ministry of Expatriates’ Welfare and Overseas Employment, Government of the People’s Republic of Bangladesh. (2016). “*Action Plan for the Implementation of the Expatriates’ Welfare and Overseas Employment Policy 2016*”.

Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia. *Developing Eight (D-8)*. Diakses pada 18 Agustus 2023 dari kemlu.go.id.

Monash University Malaysia. (2023). *Migration and Mobility in Asia*. Diakses pada 7 Juli 2023 dari monash.edu.my

New Straits Times. “*D-8 Summit to see discussions in six areas of economic cooperation*”, diakses di <https://www.nst.com.my/amp/news/nation/2021/04/680448-d-8-summit-see-discussions-six-areas-economic-cooperation> pada 19 Agustus 2023

Observatory of Economic Complexity. *Bangladesh (BGD) and Malaysia (MYS) Trade*”. Diakses pada 14 Agustus 2023 dari <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/bgd/partner/mys>

Ohchr.org. “*Bangladesh Must Suspend Pilot Project to Return Rohingya refugees to Myanmar : Un Expert*”

Ombudsman Republik Indonesia. *Sekilas Ombudsman*. Diakses pada 5 September 2024 dari <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt>

Ray, Michael. 2023. *Britannica : Syekh Hasina Wazed*. Diakses pada 3 Agustus 2023 dari <https://www.britannica.com/biography/Sheikh-Hasina-Wazed>

- Republic of Turkiye Ministry of Foreign Affairs. *Developing Eight (D-8) Organization for Economic Cooperation*. Diakses di pada 18 Agustus 2023 dari https://www.mofa.gov.tr/d-8_en.mfa
- Reuters. *Malaysia Bans Bangladeshi Workers Dhaka Upset*. Diakses pada 7 Desember 2022 dari <https://www.reuters.com/article/idlNIndia-29846720071004>
- Serupa.id.(2021). “Metode Penelitian Deskriptif : Pengertian, Langkah & Macam” Diakses pada 23 Agustus 2022 dari <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>.
- Syafnidawaty.2020. Universitas Raharja :”*Data Primer*”. Diakses pada 7 Juli 2022 dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> .
- The Business Standard. (2021). *Bangladesh Malaysia May Sign MoU 19 Dec to Recruit Workers*. Diakses pada 1 Maret 2023 dari <https://www.google.com/amp/s/www.tbsnews.net/bangladesh/migration/bangladesh-malaysia-may-sign-mou-19-dec-recruit-workers-343234%3famp>
- The Business Standar. *Bangladesh keen to sign FTA with Malaysia : Finance Minister*. Diakses pada 16 Agustus 2023 dari <https://www.tbsnews.net/bangladesh/bangladesh-keen-to-sign-fta-malaysia-kamal-504798%3famp>
- The Business Standar. (2023). *Is Malaysia becoming the first choice for Bangladeshi Workers?*. Diakses pada 28 Januari 2024 dari <https://www.tbsnews.net/bangladesh/migration/malaysia-becoming-first-choice-bangladeshi-workers-653514> pada 28 Januari 2024.
- The Business Standar. (2023). *Remittance to Bangladesh to remain flat at \$23 billion in 2024 : World Bank*. Diakses pada 13 Februari 2024 dari <https://www.tbsnews.net/economy/banking/remittance-bangladesh-remain-flat-23b-2024-world-bank-760162>
- The Center to Combat Corruption and Cronyism (C4).(2024). *PAC findings expose massive misgovernance issue at the heart of migrant labour recruitment, police investigations must ensue*. Diakses pada 12 September 2024 dari <https://c4center.org/pac-findings-expose-massive-misgovernance-issue-at-the-heart-of-migrant-labour-recruitment-police-investigations-must-ensue/>
- The Daily Star.(2022). *Labour recruitment to Malaysia, Time to Break the Never Ending Cycle*. Diakses pada 8 Desember 2022 dari <https://www.google.com/amp/s/www.thedailystar.net/opinion/views/news/labour-recruitment-malaysia-time-break-the-never-ending-cycle-3079011%3famp>
- The Daily Star. *Recruitment in Malaysia : Dhaka, Kuala Lumpur Sign MoU*. Diakses pada 5 Agustus 2023 dari <https://www.thedailystar.net/nrb/migration/news/recruitment-malaysia-dhaka-kuala-lumpur-sign-mou-2920906%3famp>
- The Daily Star.(2021). *FTA with Malaysia back on the table*. Diakses di pada 16 Agustus 2023 dari <https://thedailystar.net/business/news/fta-malaysia-back-the-table-2099609%3famp>

- The Daily Star. (2021). *Recruitment in Malaysia : Dhaka, Kuala Lumpur Sign MoU*. Diakses pada 30 Agustus 2023 dari <https://www.thedailystar.net/nrb/migration/news/recruitment-malaysia-dhaka-kuala-lumpur-sign-mou>
- The Star Malaysia.(2021). *Bangladesh Sign MoU on Recruitment of Workers*. Diakses pada 13 Desember 2022 dari <https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/12/19/malaysia-bangladesh-sign-mou-on-recruitment-of-workers>
- The Star Malaysia.(2021). *Bangladesh Sign MoU on Recruitment of Workers*. Diakses pada 13 Desember 2022 dari <https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/12/19/malaysia-bangladesh-sign-mou-on-recruitment-of-workers>
- USA For UNHCR. (2024). *Rohingya Refugee Crisis Explained*. Diakses pada 26 Juli 2024 dari <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>
- United Nation.org.Global Issues :*Migration*. Diakses pada 22 Juli 2024 dari <https://www.un.org/en/site-search?query=Global+Issues>
- US Department of State. *2022 Trafficking in Persons Report : Malaysia*, Diakses pada 11 Desember 2022 dari <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/malaysia/>
- US Department of State. *2022 Trafficking in Persons Report : Bangladesh*, Diakses pada 11 Desember 2022 dari <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>
- U.S. Embassy In Malaysia. *2024 Trafficking in Persons Report Malaysia*. Diakses pada 24 September 2024 dari [https://my.usembassy.gov/2024-trafficking-in-persons-report-malaysia/#:~:text=MALAYSIA%20\(Tier%202\)&text=The%20Government%20of%20Malaysia%20does,was%20upgraded%20to%20Tier%202](https://my.usembassy.gov/2024-trafficking-in-persons-report-malaysia/#:~:text=MALAYSIA%20(Tier%202)&text=The%20Government%20of%20Malaysia%20does,was%20upgraded%20to%20Tier%202)
- Zorlu, Faruk. Anadolu Anjansi :”*D-8 aims to accelerate growth, achieve its decennial target by 2030*” diakses di <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/d-8-aims-accelerate-growth-achieve-its-decennial-target-by-2030/2924237> pada 19 Agustus 2023.
- Azad, Ashraful.(2018). *Recruitment of Mirant Wokers in Bangladesh : Elements of Human Trafficking for Labor Exploitation*. Journal of Human Trafficking, hal 130.
- Chin, Low Choo.(2020).*Migrant Labour Recruitment Reform in Malaysia : Towards Ethical and Zero-Cost Migration*. Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol.10, (2), hal 143.
- Dolhan, Norliza et all. (2021). *Human Trafficking and Human Security in Southeast Asia : A Case Study of Bangladesh Foreign Workers in Malaysia*. Journal of Nusantara Studies. Vol. 6, hal 139.
- Harun, Ruhanas.(2019). “*The Rohingya Refugees in Malaysia : Issues, Approches, National Security Implications and challenges*” .Journal of Public and Safety.Vol. 9 No.1, Hal 48.
- Ismail, Rahmah & Ferayuliani Yuliyusman.(2014).“*Foreign Labour on Malaysia Growth*” Journal of Economic Integration Vol. 29.No.4, Hal-659.

- Izzuddin, Mustafa. (2020) .Institute of South Asian Studies : “*Rebooting Bangladesh – Malaysia Relations*”, No. 606, hal 1.
- Khondaker, M. Shahidul Islam. (2021) . “*Tun Mahathir’s Administration of Malaysia’s Relationship With Bangladesh : A Preliminary Appraisal*”. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 6 No. 30, hal 8.
- Riana, Era.(2016). *Kerja sama Indonesia – Korea Selatan Dalam Mendukung Program One Village One Product (OVOP) Di Indonesia 2013-2015*. Jurnal Hubungan Internasional Universitas Riau. Vol. 3 (1), hal 5.
- Rahman, Afzalur.(2020) . “*A Study on Irregular Migration From Bangladesh to Malaysia Through the Bay of Bengal and The Andaman Sea*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan .Vol. 10 (2) .hal 121.
- Spaan, Ernst dan Ton van Naerssen.(2018). *Migration Decision Making and Migration Industry in The Indonesia – Malaysia Corridor*. Jurnal Studi Etnis dan Migrasi. Vol. 44 (4). hal 680.
- Aun, Lee Hwok & Adrian Pereira.(2023). Paper : “*Can Malaysia Eliminate Forced Labour By 2030?*”. hal - 4.
- Bossavie, Laurent. (2023). Paper : “*Low-skilled Temporary Migration Policies : The Case of Bangladesh*”. hal-3.
- Hossain, Ishrat. (2020). German Institute for Global and Areas Studies : “*After Humanitarianism : Bangladesh’s Evolving Rohingya Policy*” . hal - 3.
- International Labour Organization. (2020). Research Brief : “*Public Attitudes Towards Migrant Workers in Malaysia*”. Hal-1.
- Menteri Sumber Manusia Malaysia : Nota Kesepahaman Untuk Perekrutan Tenaga Kerja dari Bangladesh
- Minister of Human Resources Media Statement : “*The Current Situation of Foreign Workers Recruitment in General and From Bangladesh*”
- Mobarak, Mushfiq, et all. (2020). Policy Research Working Paper 9165 : “*Returns to Low-Skilled International Migration*”. (Bangladesh : World Bank Group). Hal 9.
- Mubde, Mutasim Billah et all.(2022). *The Hidden Costs of Migration : Evaluating the Bangladesh – Malaysia Corridor*. (Arkansas : Winrock International. Hal 5.
- Mohamad, Mafozah, Zaidi Hassim.(2024). Online Paper : “*Malaysian Dependency on Foreign Workforce : The Economic Implication Post COVID-19*” diakses di europeanproceedings.com pada 25 Januari 2024.
- Moravcsik, Andrew.(1992). *Liberalism and International Relations Theory*. (Cambridge : Harvard University). Hal 26.
- Seng, Tan See.(2001). Institute of Defence and Strategic Studies Singapore : “*Human Security : Discourse, Statecraft, Emancipation*”. Paper (Singapore). Hal 15.
- Wei, Ang Jian. dkk. (2018). Article of Bank Negara Malaysia : “*Low-Skilled Foreign Workers’s Distortions to the Economy*”. Hal-5.